

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa. Sukirno (2006) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran dari perkembangan perekonomian dalam periode masa tertentu bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat selama periode waktu tertentu. Karena kegiatan ekonomi pada dasarnya ialah proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk, proses ini menghasilkan imbalan atas faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi diharapkan pula meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan yang lebih bersifat kuantitatif.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan produk domestik bruto (PDB) dalam lingkup nasional. Dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta meratanya distribusi pendapatan. Kemampuan negara dalam

mengembangkan potensi sumber dayanya merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi. Semakin besar kuantitas dan semakin tinggi kualitas sumber daya, maka potensi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya semakin besar pula. Kemudian salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data produk domestik regional bruto (PDRB), hal ini dikarenakan nilai PDRB mampu menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada.

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori dari pertumbuhan ekonomi klasik berkembang sejak abad ke-18. Pencetus dari teori ini adalah seorang tokoh terkemuka yaitu Adam Smith yang mengatakan bahwa ekonomi negara akan mencapai puncaknya dengan menggunakan sistem liberal yang terdiri dari dua faktor utama yaitu pertumbuhan penduduk dan produksi. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor yang menggunakan faktor-faktor produksi. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai pendidikan, pelatihan, dan manajemen yang lebih baik. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada tiga faktor produksi suatu negara, yaitu:

- a. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah kegiatan produktif yang paling mendasar dalam masyarakat, dimana jumlah sumber daya

alam yang tersedia dibatasi secara maksimal untuk pertumbuhan ekonomi.

- b. Sumber daya manusia (penduduk) berperan pasif dalam proses pertumbuhan produktif, yang artinya bahwa populasi beradaptasi dengan permintaan tenaga kerja.
- c. Persediaan modal merupakan faktor produksi yang sangat menentukan tingkat laju pertumbuhan produksi

Kemudian David Ricardo telah mengembangkan pemikiran-pemikiran Adam Smith. Menurut David Ricardo (1817) dalam bukunya "*Principles of Political Economy and Taxation*", menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, dimana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (*subsistence level*). Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandegan) yang disebut *stationary state*. sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan.

2. Teori Neoklasik

Menurut Joseph Schumpeter (1911), ekonomi suatu negara dapat meningkat apabila pengusaha membuat inovasi dan kombinasi baru terkait proses produksi maupun investasi bisnisnya. Dalam teori ini, kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang usaha dan memperluas usaha. Dengan demikian, tersedia

lapangan kerja tambahan untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang selalu bertambah di setiap tahun.

Dalam pandangan Robert M. Solow (1970), ada empat faktor utama produksi, yaitu manusia, teknologi modern, akumulasi modal, dan hasil. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif ataupun negatif. Oleh karenanya, pertumbuhan tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya produktif. Selain itu, Solow juga berpendapat bahwa tingkat tabungan berpengaruh pada modal dan hasil. Jika tingkat tabungan tinggi, modal dan hasil juga ikut meningkat.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori pertumbuhan ekonomi modern didukung oleh Walt Whitman Rostow (1960). Rostow mengemukakan pandangannya bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi dalam lima tahap, yakni:

- a. Masyarakat tradisional: Tahap ketika kegiatan produksi masih sederhana dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi.
- b. Pra lepas landas: Tahap ketika masyarakat dalam proses transisi penerapan ilmu modern pada pertanian dan industri.
- c. Lepas landas: Tahap di mana masyarakat mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara luas melalui investasi efektif serta tabungan produktif.
- d. Dorongan menuju kedewasaan: Tahap saat perekonomian tumbuh secara teratur, lapangan usaha bertambah, serta semakin masifnya

penerapan teknologi modern yang diikuti peningkatan investasi dan tabungan.

- e. Konsumsi tinggi: Tahap saat sektor industri memimpin dan pendapatan per kapita riil terus meningkat sehingga konsumsi masyarakat juga meningkat.

4. Teori Karl Bucher

Bucher (1893) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Tahapan pada teori ini adalah:

- a. Rumah tangga tertutup, masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri.
- b. Rumah tangga kota, sudah muncul hubungan dagang antar desa dan desa dengan kota.
- c. Rumah tangga bangsa/kemasyarakatan, perdagangan antar kota akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara.
- d. Rumah tangga dunia, yaitu masa dimana pertukaran atau perdagangan sudah melewati batas batas negara karena adanya hubungan saling membutuhkan antar-negara. Perdagangan antar-negara juga didukung dengan kemajuan teknologi yang memudahkan manusia berhubungan dengan negara lain.

5. Teori *Fiscal Federalism*

Teori *fiscal federalism* menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Teori *fiscal federalism* adalah teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945) pada generasi pertama, kemudian terdapat teori perspektif baru atau generasi kedua yang dibangun oleh Musgrave tahun 1959 dan Oates tahun 1972. Musgrave dan Oates lebih menekankan pentingnya *revenue* dan *expenditure assignment* antar level pemerintahan.

Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal (kabupaten/kota) akan lebih didengarkan untuk menganeekaragamkan pilihan lokal/daerah dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi.

6. Teori *Human Capital*

Human capital merupakan istilah yang sering digunakan ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang dapat meningkatkan produktivitas apabila hal-hal tersebut ditingkatkan. Menurut Todaro (2015) menyatakan bahwa konsep dari sebuah *human capital* dapat dilihat melalui seseorang yang melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Investasi dalam *human capital* berupa investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Terdapat dua pendekatan penting dalam teori *human capital*, yaitu pendekatan Nelson-Phelp dan pendekatan Lucas. Pendekatan Nelson-Phelp (1966) menyimpulkan bahwa *human capital* merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adanya peningkatan *stock human capital* akan meningkatkan pendapatan suatu negara melalui produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan akibat pendidikan yang diperoleh, dengan kata lain pekerja yang berpendidikan tinggi akan mampu merespon inovasi yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sementara pendekatan Lucas (1988) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berakar dalam memperluas *human capital storage*, serta sebagian besar perbedaan pendapatan disebabkan oleh jumlah yang berbeda dari investasi *human capital*. Lucas melihat peningkatan investasi *human capital* sebagai faktor dasar yang dibutuhkan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan pribadi.

Menurut Nurhayati (2016) terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya:

a. Sumber daya alam

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dan juga pilihan pertama dalam pembangunan, sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan hasil hutan, tambang dan juga laut.

b. Sumber daya modal

Sumber daya modal merupakan faktor yang utama akan tetapi sumber daya modal harus didukung bersamaan dengan sumber daya manusianya, sumber daya modal berupa barang yang penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas.

c. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Teknologi saat ini berkembang dengan pesat hal tersebut berefek dengan adanya perkembangan proses pembangunan, pekerjaan yang awalnya menggunakan tenaga manusia mulai digantikan oleh mesin mesin canggih yang menyebabkan meningkatnya efisiensi, kualitas dan kuantitas hal ini mengakibatkan percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

d. Budaya

Budaya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui sikap kerja cerdas, kerja keras, jujur dan sebagainya.

2.1.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Nilai tambah bruto dihitung dengan menjumlahkan komponen-komponen pendapatan faktor, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga pasar atau harga berlaku. PDRB juga dapat

dihitung berdasarkan pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih.

Pertumbuhan PDRB menurut Kuznets (1955) dapat diartikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang bernilai ekonomi. Menurut Mankiw (2003), PDRB adalah nilai pasar dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama kurun waktu tertentu. Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut. Sementara menurut Tarigan (2005), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah.

2.1.1.4 Metode Perhitungan PDRB

Pada metode penghitungan PDRB ini dapat dilakukan menggunakan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dari tiga pendekatan tersebut akan memberikan hasil yang sama.

1. Pendekatan Produksi

Berdasarkan pendekatan produksi, PDRB ialah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori lapangan usaha diantaranya pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan

penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

2. Pendekatan Pendapatan

Berdasarkan pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3. Pendekatan Pengeluaran

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, PDRB ialah semua komponen penggunaan dari permintaan akhir yang terdiri dari beberapa pengeluaran yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga; pengeluaran lembaga non profit yang melayani rumah tangga; pengeluaran konsumsi pemerintah; pembentukan modal tetap domestik bruto; perubahan inventori; ekspor - impor barang dan jasa.

Cara penyajian PDRB dilakukan sebagai berikut:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

PDRB atas dasar harga berlaku adalah PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun berjalan, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.

2. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)

PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang dinilai berdasarkan harga barang dan jasa pada tahun tertentu atau tahun dasar, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.

Dalam penelitian ini PDRB yang digunakan adalah PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Ciamis dalam miliar rupiah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Analisis Keynes (1936) terkait peranan kebijakan fiskal ialah untuk memacu laju pembentukan modal di negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan dengan PDRB, membutuhkan modal sebagai usaha pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Menurut teori *fiscal federalism* pertumbuhan ekonomi akan tercapai melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal menjadi salah satu pilar dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena tujuan utama desentralisasi fiskal yaitu terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik untuk seluruh masyarakatnya. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana masyarakat

maka konsumsi dan produktivitas masyarakat pun akan meningkat, sehingga pendapatan masyarakat pun meningkat, dengan begitu kemampuan masyarakat untuk membayar pajak pun meningkat. Hal ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan menggali potensi daerah, pendapatan asli daerah akan meningkat, artinya penerimaan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sehingga daerah mampu mendorong pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah. Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan bersumber dari pungutan-pungutan yang dilakukan oleh daerah yang berdasarkan dari kebijakan - kebijakan yang sudah berlaku dengan mempunyai suatu tujuan dalam memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali suatu pendanaan untuk melaksanakan ekonomi daerah sebagai suatu perwujudan atas desentralisasi (Billah dan Wijaya, 2022).

Sumber – sumber pendapatan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Menurut Sun'an dan Senuk (2015) desentralisasi mengenai kewenangan pemerintahan menyangkut berbagai aspek misalnya desentralisasi politik, ekonomi dan sosial serta aspek fiskal. Dengan begitu, desentralisasi fiskal menjadi salah satu pilar dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah.

Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Kelompok pendapatan asli daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari :

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah dibagi menjadi daerah tingkat I (pajak provinsi) dan daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota).

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dinikmati oleh pembayar retribusi. Berdasarkan Undang – Undang

No. 34 Tahun 2000, ada dua jenis pendapatan retribusi berdasarkan pungutan yang dilakukan daerah tingkat I (retribusi provinsi) dan daerah tingkat II (retribusi kabupaten/kota).

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis pendapatan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah diantaranya ialah laba, dividen, dan penjualan saham.

4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain – lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Tuntutan ganti rugi;
- e. Komisi;
- f. Potongan;
- g. Keuntungan selisih kurs;

- h. Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
Pendapatan denda pajak dan retribusi;
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; serta
- j. Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum

Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana yang diperoleh berdasarkan inovasi dan kreasi pemerintah daerah untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, banyak pemerintah daerah yang bersinergi dengan DPRD guna mencari peluang - peluang baru sebagai sumber pemasukan kas daerah. Darmawan (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Adapun pendapatan asli daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis dalam juta rupiah.

2.1.3 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan yang bersumber dari pusat. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya.

Prinsip dana alokasi umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara

kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi dana alokasi umum yang relatif besar. Besaran dana alokasi umum ditetapkan sekurang – kurangnya 25% dari APBN. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% dan penggunaannya diserahkan kepada daerah tersebut secara mandiri sesuai dengan sistem otonomi daerah. Daerah yang memiliki nilai kesenjangan fiskal sama dengan nol akan mendapatkan DAU sebesar alokasi dasar. Proporsi DAU terhadap pertumbuhan daerah lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Kuncoro (2012) bahwa berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta PP No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, menyebutkan bahwa dana alokasi umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Mardiasmo (2006) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah yaitu untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geo-graphical equity*); untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*); untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif; serta untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah.

Adapun indikator dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

1. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari rata-rata pengeluaran atau belanja daerah, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks kemiskinan relatif.
2. Dari penerimaan daerah, terdiri dari penerimaan daerah, indeks industri, indeks sumber daya alam, dan indeks sumber daya manusia.

Pengalokasian dana alokasi umum lebih diprioriaskan pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, dimana daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif lebih rendah agar dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam era otonomi. Sebab pada dasarnya, dana alokasi umum dialokasikan untuk kabupaten/kota bertujuan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur yang ada pada setiap daerah serta agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan menciptakan *multiplier effect*, dimana terdapat pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi yakni peningkatan pengeluaran nasional mempengaruhi peningkatan pendapatan dan konsumsi.

Teori keagenan (*agency theory*) dapat menggambarkan hubungan dana alokasi umum dengan PDRB. Menurut Jansen dan Mecking (1976) teori keagenan menjelaskan sebuah persetujuan antara dua pihak prinsipal dan agen. Kaitan teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat melalui kegiatan transfer dana atau penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar dapat menambah pendapatan daerah untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya, kemudian diharapkan pemerintah daerah dapat mengatur secara mandiri segala aktivitas

pemerintahannya. Sehingga ketika dana alokasi umum dikelola secara efisien dan transparan maka dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk proyek-proyek pembangunan dan program-program pemerintah, yang pada gilirannya dapat berpotensi meningkatkan PDRB daerah tersebut. Adapun dana alokasi umum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu realisasi dana alokasi umum Kabupaten Ciamis dalam miliar rupiah.

2.1.4 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” sebagai pengukurannya. Meskipun istilah populasi mengacu pada semua spesies, tapi itu selalu mengacu pada manusia dan sering digunakan secara informal untuk menunjukkan nilai demografi pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk pada suatu daerah tergantung pada besarnya kelahiran (*birth=B*), kematian (*death=D*), migrasi masuk (*in migration=IM*), dan migrasi keluar (*out migration=OM*). Penduduk akan bertambah jumlahnya jika ada bayi lahir dan penduduk yang datang dan penduduk akan berkurang jumlahnya jika ada penduduk yang mati dan yang meninggalkan daerah tersebut. Untuk menghitung perubahan penduduk metode yang sangat sederhana dari tahun ke tahun, yaitu dengan persamaan berimbang (*the balance equation*) dengan rumus sebagai berikut:

$$P_t = P_o + (B - D) + (IM - OM)$$

Dimana:

Pt = banyaknya penduduk pada tahun akhir

Po = banyaknya penduduk pada tahun awal

B = banyaknya kelahiran

D = banyaknya kematian

IM = banyaknya migrasi masuk

OM = banyaknya migrasi keluar

(B-D) = pertumbuhan penduduk alamiah

(IM-OM) = migrasi netto.

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk berguna untuk memperkirakan jumlah penduduk di suatu wilayah di masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk di masa mendatang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga di bidang politik.

Thomas Robert Malthus merupakan tokoh yang pertama mengemukakan terkait kependudukan. Dalam "*Essay On Population*", Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, akan tetapi pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad, 2014) mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan

hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Sedangkan Karl Marx dengan aliran marxistnya tidak sependapat dengan aliran Malthus, Marxist mengungkapkan bahwa tekanan penduduk di suatu negara bukan karena tekanan penduduk terhadap bahan makanan, akan tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misal pada negara kapitalis). Marxist juga mengungkapkan bahwa jumlah manusia yang semakin banyak, semakin tinggi pula produk yang dihasilkan. Dengan demikian, pembatasan penduduk tidak diperlukan. Dasar dari pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah masyarakat akan dapat beradaptasi dengan waktu. Perbedaan antara pandangan Marxist dan Malthus adalah pada "*Natural Resource*" bahwa mereka tidak dapat mengeksploitasi sumber daya alam atau mengikuti pertumbuhan penduduk.

Penduduk sebagai pemicu pembangunan sebenarnya merupakan pasar potensial dan sumber permintaan untuk berbagai jenis kegiatan ekonomi, menciptakan skala ekonomi dan keuntungan produksi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, dan mengurangi biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang produksi agregat yang

lebih tinggi lagi. Sehingga pada akhirnya, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Menurut Dumairy (2016) menjelaskan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen sementara dari sisi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini memiliki kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan, ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi penambahan penduduk dengan tingkat penghasilan rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi.

Todaro (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestik. Sementara Kuznets mengemukakan bahwa dalam perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk awalnya dapat meningkatkan PDRB pada tahap tertentu yakni ketika produktivitas meningkat, namun pertumbuhan penduduk yang berlebihan pun dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Teori *human capital* menganggap penduduk sebagai aset ekonomi. Jika pertumbuhan penduduk diimbangi dengan investasi dalam pendidikan dan

pelatihan, hal ini dapat meningkatkan PDRB karena tenaga kerja menjadi lebih produktif. Kemudian pada teori demografi ekonomi menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dapat memiliki efek positif atau negatif tergantung pada sejauh mana penduduk dapat memberikan kontribusi ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang berkontribusi positif melalui tenaga kerja produktif dapat meningkatkan PDRB. Adapun pertumbuhan penduduk yang digunakan pada penelitian ini yaitu laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ciamis dalam persen.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan oleh lembaga UNDP (*United Nation Development Program*) sebagai “suatu proses untuk memperluas berbagai macam pilihan bagi penduduk”. Dengan demikian, IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. UNDP telah menerbitkan laporan pembangunan sumber daya insani dalam satuan kuantitatif yang disebut dengan HDI (*Human Development Indeks*). Menurut Badan Pusat Statistik (2014), Komponen HDI disusun dari tiga komponen, yakni:

1. Kesehatan (diukur dari angka harapan hidup sejak lahir)
2. Pendidikan (diukur dari angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa)
3. Standar hidup layak (diukur dari kemampuan daya beli)

Mahroji dan Nurhasanah (2019) menyatakan bahwa IPM merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sejumlah komponen

dasar yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat produktifitas yang dihasilkan untuk memperbaiki tingkat kualitas hidup seseorang.

Todaro (2006) Indeks pengembangan kualitas manusia diperhatikan dari segi perluasan jangkauan, pembagian yang rata penerimaan dan keadilan dalam akses kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan seluruh elemen masyarakat. Kurangnya upaya pengembangan IPM dapat mengakibatkan minimnya pendapatan dan akan mengakibatkan kenaikan angka penduduk kurang mampu. Dalam hal ini pembangunan manusia diukur dengan IPM yang menjadi indeks komposit untuk mengukur capaian kualitas pembangunan manusia.

Marisca dan Haryadi (2016) menyatakan bahwa tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. UNDP (2001) menyebutkan bahwa terdapat beberapa konsep pembangunan sumber daya yang dalam konteks makro merupakan keseluruhan dari proses aktivitas peningkatan kemampuan manusia yang didalamnya mencakup berbagai aktivitas, yaitu pengembangan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan gizi, kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan ditempat kerja, serta kehidupan politik yang bebas. Pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia harus selalu diupayakan oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. $IPM \geq 80$ (sangat tinggi), artinya wilayah dengan IPM kategori sangat tinggi mencerminkan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintah yang baik sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sebab, IPM pada kategori ini memiliki investasi yang sangat besar dalam sektor pendidikan dan kesehatan yakni mampu menciptakan angkatan kerja terdidik, akses layanan kesehatan yang efektif, selain itu dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
2. $70 \leq IPM < 80$ (tinggi), artinya wilayah dengan IPM kategori tinggi memiliki tingkat pendidikan, kesehatan, serta daya beli yang cukup tinggi meskipun tidak sebaik IPM kategori sangat tinggi. Pada kategori ini akses pendidikan tetap tinggi, layanan kesehatan yang baik, serta tingkat pendapatan per kapita tetap moderat hingga tinggi memberikan kualitas hidup yang baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. $60 \leq IPM < 70$ (sedang), artinya wilayah dengan IPM kategori sedang mengindikasikan perkembangan manusia berada di tingkat menengah hingga rendah yakni sedang atau berencana untuk meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan yang memadai. Pada kategori ini standar hidup yang layak tersedia bagi sebagian besar penduduk, maka IPM dalam kisaran ini bergantung pada kemampuan suatu

wilayah untuk melanjutkan upaya perbaikan ketidaksetaraan ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

4. IPM < 60 (rendah), artinya wilayah dengan IPM kategori rendah mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki akses yang terbatas terhadap kesehatan, bermasalah pada akses pendidikan, dan dapat terjadinya kesenjangan. Kemudian masyarakat akan menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan sangat bergantung pada bantuan pembangunan yang dapat membantu membiayai proyek-proyek pembangunan ekonomi.

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan perhitungan IPM dengan metode baru. Perubahan metodologi IPM dilakukan karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf (AMH) yang digunakan pada perhitungan metode lama, sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh sebab tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Kemudian penggunaan rumus rata-rata ukur dalam perhitungan IPM metode lama menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

**Tabel 2.1 Perbandingan Perhitungan IPM
metode lama dan metode baru**

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)
Pendidikan	1. Angka Melek Huruf (AMH) 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	1. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	Pengeluaran Per Kapita	Pengeluaran Per Kapita
Agregasi	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pendapatan}) \times 100$	Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pendapatan}} \times 100$

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum level IPM metode baru lebih rendah dibandingkan dengan IPM metode lama, sebab terdapat perubahan komponen dalam perhitungannya. Kemudian dengan menggunakan rata-rata ukur dalam metode baru capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain, sehingga ketiga dimensi memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Pada dasarnya konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. IPM dapat memberikan pandangan yang holistik tentang kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, peran IPM sebagai alat evaluasi yang terus berkembang membantu daerah-daerah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai bahan acuan dan referensi dalam proses penelitian. Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produk domestik regional bruto di Kabupaten Ciamis tahun 2000-2022.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan serta referensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rani Wulantari dan Meidy Haviz (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto	Penanaman modal dalam negeri, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks pembangunan manusia	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto, sementara penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Vol. 1, No. 1, Tahun 2021, Hal: 8-14 ISSN: 2798-639X

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat 2003- 2017				
2	Andini Mulyasari (2016) Pengaruh Indeks Pembangun- an Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Indeks pembangun- an manusia dan produk domestik regional bruto	Angkatan kerja, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan laju pertumbuh- an penduduk	Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto dan angkatan kerja pun berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto	<i>Econom ics Develop ment Analysis Journal</i> 5 (4) (2016) ISSN 2252- 6765
3	Ayu Fatmasari Tumaleno (2022) Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Tenggara	Jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan indeks pembangun- an manusia	Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto	Arus Jurnal Sosial dan Humani ora, 2 (3), 189- 195, 2022 ISSN: 2808- 1307
4	Hasdi Aimon dan Rova Luarta Putra (2015)	Pendapatan asli daerah, dana alokasi	Dana Alokasi Khusus, Laju	Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif dan	Jurnal Kajian Ekonomi Vol 4,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Sumatera Barat	umum, dan produk domestik regional bruto	pertumbuhan penduduk, dan indeks pembangunan manusia	signifikan terhadap PDRB Dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap PDRB	No. 7 (2015)
5	Andre Wibowo, Een, dan Wensy (2023) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks pembangunan manusia dan PDRB	Tenaga kerja, belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan laju pertumbuhan penduduk	Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB, Sementara tenaga kerja dan belanja pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 23, No. 7 (2023)
6	Prince Charles Heston dan Norsaidatul Akmar Mazelan (2023)	Dana alokasi umum, indeks pembangunan manusia, dan	Dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah dan laju	Dana alokasi umum, alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan	<i>International Journal of Politics and Sociology</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Dana Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia	pertumbuhan ekonomi	pertumbuhan penduduk	terhadap pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia	<i>Research</i> , 11 (1), 2023 pp.167-168
7	Dwi Yuniarto (2021) Analisis Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi	Kepadatan penduduk, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan indeks pembangunan manusia	Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Forum Ekonomi, Vol 23, No. 4 Tahun 2021, 687-698 ISSN: 1411-1713
8	Nurul Izzah (2015) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau	Indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi	Inflasi, Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan indeks pembangunan manusia	Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sementara inflasi berpengaruh negatif terhadap	Jurnal Ekonomi IAIN Padangsi dimpuan, Vol. 1, No. 2, tahun 2015

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tahun 1994-2013			pertumbuhan ekonomi	
9	Eleonora Sofilda, Muhammad Zilal, dan Suhail Kusairi (2023) Analisis Desentralisasi Fiskal, Pembangunan Manusia, dan PDRB di Indonesia	Pendapatan asli daerah, pembangunan manusia, dan PDRB	Tingkat desentralisasi, dana transfer, hibah pemerintah pusat, dana alokasi umum, dan laju pertumbuhan penduduk	Pendapatan asli daerah, hibah pemerintah pusat, dan pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sementara tingkat desentralisasi dan dana transfer berpengaruh negatif terhadap PDRB	<i>Development Economics Research Article</i> (2023), 11:22205-20
10	Ardian Luthfan Aditya (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan PDRB	Dana alokasi khusus, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks pembangunan manusia	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sementara dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB	<i>Syntax Idea: p-ISSN: 2684-6853:2684-883X</i> Vol.4, No. 1, Tahun 2022
11	Patric Rarung (2016) Pengaruh PAD dan DAU Terhadap PDRB di Kota Manado	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto	Indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan penduduk	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, sementara dana alokasi umum tidak berpengaruh	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16, No. 3 (2016)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				signifikan terhadap PDRB	
12	Rendy Alvaro (2022) Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Daerah Tertinggal	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto	Dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja daerah, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks pembangunan manusia	Pendapatan daerah, alokasi dana khusus, belanja berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto, sementara dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto	Jurnal <i>Budget</i> Vol. 7, Edisi 2, 2022
13	Lisa A dan M. Rusmin (2023) Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Ketergantungan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin	Laju pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi	Rasio ketergantungan, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum	Laju pertumbuhan penduduk dan IPM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara rasio ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 6, No. 1, 2023, hal 412-420 ISSN 2746-3249
14	Haidir Aulia R, Theresia, dan Siti Amalia	Pertumbuhan penduduk dan produk domestik	Investasi sektor industri, pengeluaran	Pertumbuhan penduduk, investasi industri	Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2017) Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Investasi Sektor Industri serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang	regional bruto	pemerintah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan indeks pembangun- an manusia	berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto, sementara pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto	man, Vol. 2, No. 1 (2017)
15	Abdul Mafahir dan Aris Soelistiyo (2017) Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap PDRB Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto	Dana alokasi khusus, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks pembangun- an manusia	Pendapatan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB, Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sementara dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB	Jurnal Ilmu Ekonomi , Vol 1 jilid 1 (2017), Hal. 143- 152

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto

Mahafir dan Soelistiyo (2017) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal setiap daerah berlomba-lomba dalam meningkatkan PAD, karena dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut dapat dikatakan mampu membangun secara mandiri, yang selanjutnya berdampak pada kegiatan ekonomi yang tinggi pada setiap tahunnya, sehingga akan memberikan kontribusi bagi produk domestik regional bruto.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rani Wulantari dan Meidy Haviz (2017) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto, dengan demikian apabila PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah meningkat maka PDRB di daerah tersebut juga akan meningkat. Hal ini disebabkan karena PAD itu merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri. Penelitian tersebut didukung oleh Eleonora, Zilal, dan Suhal (2023) serta penelitian Ardian (2022) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Indonesia. Kemudian menurut Hasdi dan Rova (2015) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Teori Wagner menyebutkan bahwa semakin tinggi angka PAD maka semakin tinggi pula belanja pemerintah untuk pembelian barang dan jasa,

diikuti oleh pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, serta adanya subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat dan dana pensiun, pengeluaran pemerintah tersebut pada gilirannya akan berimplikasi pada kenaikan tingkat konsumsi lalu permintaan barang dan jasa meningkat dan produsen akan meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga terjadilah kenaikan PDRB (Mangkoesoebroto, 2002).

2.3.2 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Produk Domestik Regional Bruto

Dana alokasi umum di setiap daerah memiliki peran penting bagi pendapatan daerah, sehingga semua pemerintah daerah menjadikan dana alokasi umum sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya. DAU ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). DAU digunakan untuk mendanai kepentingan daerah dengan tujuan pemerataan daerah dengan membangun sarana dan prasarana. Ketika DAU yang diterima oleh suatu daerah digunakan dengan optimal dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah, maka peningkatan dana alokasi umum akan diikuti dengan meningkatnya produk domestik regional bruto (Arisna, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Prince dan Norsaidatul Akmar (2023) dan Rendy (2022) yang menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian Hasan (2015) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi. DAU bertujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah. Kemudian menurut Ardian Luthfan Aditya (2022) bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Dengan adanya DAU yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka semakin tinggi DAU semakin tinggi pula belanja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan untuk masyarakat yang kemudian berimplikasi pada kenaikan produk domestik regional bruto.

2.3.3 Hubungan Antara Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Produk Domestik Regional Bruto

Laju pertumbuhan penduduk yang dinyatakan sebagai persentase dari jumlah penduduk dasar dapat berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto. John dan Clare (2022) menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang diimbangi dengan masyarakat produktif akan menguntungkan bagi kegiatan perekonomian suatu wilayah. Kemudian dengan meningkatnya jumlah penduduk maka tingkat konsumsi akan naik dan akan semakin meningkat pula jumlah produksi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga produk domestik regional bruto pun akan mengalami peningkatan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Yuniarto (2021) bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Kemudian didukung oleh penelitian Ayu Fatmasari Tumaleno (2022) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan, sehingga semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Laju pertumbuhan penduduk pun akan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita suatu daerah sehingga dapat mencerminkan kemajuan perekonomian daerah tersebut.

Lisa dan Rusmin (2023) menyatakan bahwa variabel laju pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk memiliki kaitan yang dipandang sebagai satu dari banyak faktor yang bagus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika kuantitas penduduk bertambah maka hal tersebut akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, sebab dengan meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada meluasnya pasar yang menjadikan tingkat spesialisasi dalam ekonomi meningkat (Nazwa *et al.*, 2023).

2.3.4 Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Produk Domestik Regional Bruto

Ady Soejoto (2016) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan faktor penting dalam menggerakkan perekonomian yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

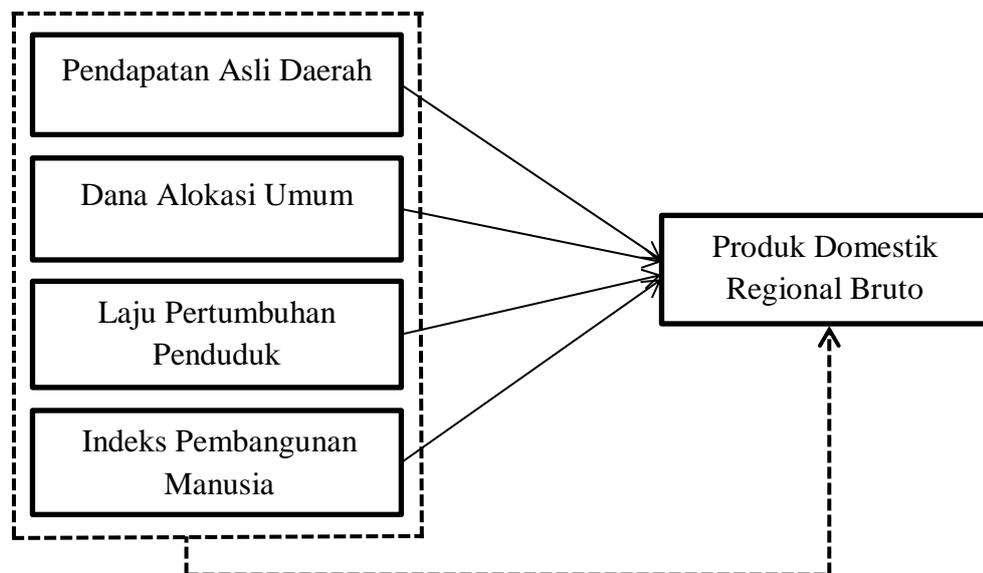
pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Upaya perbaikan kualitas pembangunan manusia dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan maka akan menciptakan masyarakat yang sehat dan terdidik sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan usaha-usaha produktif yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Dimana semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan produk domestik regional bruto dan pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi (sukirno, 2006).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andini Mulyasari (2016) bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dipicu oleh peran sumber daya manusia yang berkualitas. Diperlukan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan agar menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi dan dapat mengelola faktor produksi dengan baik, sehingga akan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu daerah melalui peningkatan produk domestik regional bruto.

Penelitian oleh Nurul Izzah (2015) dan Naura *et al.* (2022) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi apabila indeks pembangunan manusia tinggi. Peningkatan kualitas modal manusia (*human capital*) dapat tercapai dengan memperhatikan faktor-faktor penentu kualitas modal manusia yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi

mampu dimaksimalkan, dan mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan perekonomian (Sitepu dan Sinaga, 2005).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks pembangunan manusia dengan produk domestik regional bruto digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

——→ : menunjukkan hubungan secara parsial

-----→ : menunjukkan hubungan secara bersama-sama

2.4 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Diduga pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif secara parsial terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Ciamis periode 2000-2022.
2. Diduga pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Ciamis periode 2000-2022.